

Analisis Dimensi Dan Peran Aktor *Sound Governance* dalam Kerja Sama *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)

Dzakiyah Adalatul Hikmah^{1*}, Khusnul Prasetyo², Aditama Azmy Musaddad³, Eka Arum Pramestya⁴, Ika Devi Lestari⁵

^{1,2}Universitas Gadjah Mada, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: khusnulprasetyo4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi dan aktor sound governance dalam kerja sama sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool di bidang olahraga dalam rangka mengoptimalkan potensi anak muda Kota Surabaya dengan mengirimkan sepuluh (10) pemuda berbakat ke Liverpool. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, hingga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh dimensi sound governance yang ada, Kota Surabaya dan Kota Liverpool mampu membuktikan keseriusannya sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah diterjemahkan ke dalam Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU). Selain itu, keempat aktor sound governance yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan internasional telah menunjukkan kerja sama dan peran aktif mereka meskipun ada beberapa aspek yang belum bisa dioptimalkan secara penuh.

Kata kunci: sound governance, sister city, sepak bola, kota Surabaya, kota Liverpool.

Abstract

This study aims to analyze the dimensions and actors of sound governance in sister city cooperation between the City Government of Surabaya and City Government of Liverpool in the field of sports in order to optimize the potential of Surabaya City youth by sending ten (10) talented youths to Liverpool. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, literature studies, to documentation. The results showed that of the ten existing sound governance dimensions, the City of Surabaya and the City of Liverpool were able to prove their seriousness in accordance with the cooperation contract that had been translated into a Letter of Intent (LoI) and a Memorandum of Understanding (MoU). In addition, the four sound governance actors, namely the government, the public, the private sector, and the international community, have shown their cooperation and active role although there are several aspects that have not been fully optimized.

Keywords: sound governance; sister city; football; city of Surabaya; city of Liverpool.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya. Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki keleluasaan gerak dalam mengembangkan potensi daerahnya. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memiliki implikasi untuk perubahan dalam bentuk hubungan antar pemerintah. Implikasi dari perubahan-perubahan itu adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan di antara pemerintah daerah (Pratikno, 2007 dalam Firdaus, 2016).

Guna terlaksananya tata kelola pemerintah daerah yang baik, idealnya diperlukan kerja sama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan *stakeholders* daerah masing-masing. Tata kelola yang baik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil (Farazmand, 2004). Lebih lanjut, pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan *stakeholders* luar negeri untuk memajukan daerahnya sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri) Bab III Pasal 3 mengenai Bentuk Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk: a. kerja sama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”; b. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; c. kerja sama penyertaan modal; dan d. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek potensi sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya manusia, sehingga dengan memberdayakan masyarakat dapat menjadi keuntungan yang luar biasa bagi suatu daerah.

Konsep hubungan kemitraan antar kota mulai berkembang pada tahun 1960-an. Perkembangan hubungan kerja sama antar kota/antar provinsi lebih dikenal dengan sebutan *sister city/sister province* diikuti pula dengan meluasnya konsep hubungan kerja sama luar negeri antar pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai terminologi yang digunakan di berbagai belahan dunia sebagaimana uraian sebelumnya, seperti istilah yang digunakan Perancis (*Jumelage*), Amerika Serikat, Mexico (*Sister City*), Rusia dan Inggris (*Twin Cities*), Jepang dan Cina (*Friendship City*), Jerman (*Partnerstadt*). Adapun semua istilah tadi menggambarkan konsep yang sama tentang kerja sama dua kota sebagai suatu komunitas secara internasional. Kerja sama dalam pembangunan adalah kunci untuk perubahan saat ini dalam tata kelola dan sistem manajemen (Sangkala, 2011).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu pelaku hubungan luar negeri. Potensi hubungan internasional dapat dimanfaatkan pemerintah daerah mengingat landasan hukum yang diperlukan telah ada. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kerja sama *sister city* tersebut tidak hanya antar daerah dalam negeri saja melainkan juga bisa dilakukan dengan daerah di manca negara. Potensi keberhasilan implementasi kebijakan diyakini akan lebih baik dalam kemitraan empat elemen *sound governance* dibandingkan dengan single agent (*government*). (Tjahjanulin, 2011:18-23), *sound governance* memiliki banyak dimensi. Setiap dimensi ini bekerja sama dengan lainnya seperti orkestra, dengan *leadership* yang jelas dan partisipatif dinamis elemen atau komponen interaktif, sehingga memberikan kualitas sistem governance di luar harapan.

Secara umum, konsep kerja sama *sister city* merupakan kerja sama yang diselenggarakan antara kedua kota yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di 2 kota tersebut (Damayanti, 2018). Artinya, bahwa kerja sama ini bertujuan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Selain itu dalam menjalin hubungan ini, terdapat sejumlah keuntungan dari kerja sama *sister city*, diantaranya adalah: (1) kesempatan untuk *transfer knowledge* dan *experience* dalam mengelola pembangunan terhadap bidang yang dikerja samakan; (2) mendorong munculnya ide dan peran aktif pemerintah daerah kota serta *stakeholders* lainnya; (3) Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak; (4) sebagai kesempatan *transfer culture* untuk memperkaya kebudayaan daerah (Nuralam, 2018).

Pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan *sister city* diantaranya adalah kota Bandung yang memulainya pada tahun 1960, yaitu kerja sama *sister city* yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerja sama tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung juga menjalin kerja sama *sister city* dengan beberapa kota lain di dunia diantaranya Fort Worth, Amerika Serikat, Suwon, Korea Selatan, Liuzhou, RRC, Petaling Jaya, Malaysia dan masih banyak lagi (Bagian Kerja sama Kota Bandung, 2022). Selain kota Bandung, bergeser ke wilayah tetangga sebelah barat yaitu DKI Jakarta menurut Firmansyah (2017) juga menerapkan bentuk kerja sama *sister city* dengan Seoul, Korea Selatan di bidang perkotaan dan infrastruktur. Kemudian kota Berlin, Jerman sejak 25 tahun yang lalu mengenai infrastruktur seperti fasilitas mobilitas penduduk, jalan, alat transportasi (Muhamad Rizky, 2019), dan kerja sama dengan Hanoi, Vietnam sejak 2004 di bidang manajemen dan tata kelola perkotaan (Ruslan Burhani, 2018).

Industri olahraga merupakan penyediaan produk berupa hiburan yang dikemas untuk memuaskan dalam kebutuhan masyarakat. Apalagi dengan adanya olahraga khususnya sepak bola berkembang menjadi suatu olahraga dengan tingkat fanatisme yang sangat luar biasa. Adapun

pernyataan tersebut saat ini memiliki potensi nilai yang besar untuk berkembang sebab jumlah peminatnya yang sangat luas. Peluang tersebut tentu harus dimanfaatkan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dalam hal ini yaitu PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) selaku pemegang kebijakan diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam meng-optimalkan potensi sepak bola khususnya pembinaan usia muda. Hal tersebut tertuang dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional) pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.

Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota *sister city* di Indonesia yang bekerja sama serta berkolaborasi dengan berbagai negara Internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial-budaya, olahraga, tata perkotaan dan lain-lain. Kerja sama Kota Surabaya sebagai *sister city* melakukan kerja sama dengan Kota Liverpool, hal itu dibuktikan melalui MoU yang ditandatangani secara langsung oleh Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Liverpool pada tanggal 19 Maret 2018, dengan bidang kerja sama meliputi pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar (*smart city*), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya, 2018) kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool yang menghasilkan lima kontrak kesepakatan di bidang pembangunan kualitas dan kapasitas SDM (pendidikan), seni (musik dan film), perdagangan, industri ekonomi kreatif, dan olahraga (Efendi, 2017).

Dalam kerja sama di berbagai bidang ini beberapa kota di Indonesia lainnya juga telah menjalani kerja sama Internasional dalam bentuk *sister city* seperti halnya Kota Bandung bekerja sama bidang ekonomi kreatif dengan negara Jerman di Kota *Brauschweig*, Kota Ambon dengan salah satu kota India dalam seni musik. Namun dalam kerja sama *sister city*, Khusus dalam olahraga sepak bola, patut kita garis bawahi adalah kerja sama ini dilakukan oleh *stakeholders* ‘pemerintah daerah’ bukan klub sepak bola. Karena di Indonesia, kerja sama dalam bidang sepak bola identik dilakukan oleh sebuah klub atau pemerintah yang mengasosiasi persepakbolaan yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ditegaskannya lagi, antara kota Surabaya dengan kota Liverpool dalam hal persepakbolaan menjadi sorotan di tengah masyarakat karena di daerah lain belum pernah dilaksanakan oleh ‘pemerintah kota’ manapun di Indonesia, yang ada hanyalah kerja sama yang dilakukan oleh ‘pihak klub itu sendiri’. Hal itu dibuktikan dengan temuan-temuan dalam jurnal (Pratiwi, 2019) seperti kerja sama Persib Bandung dengan Inter Milan (Italia), Bali United dengan Paris Saint-Germain (Prancis), Persija dengan Feyenoord (Belanda) Persija dengan Espanyol (Spanyol), Persija dengan Gimnasia (Argentina) lalu Korea Selatan dan pemerintah PSSI yang bekerja sama dengan Inggris (www.indosport.com). Artinya, bahwa perbedaannya adalah klub-klub ataupun pemerintah PSSI diatas bukanlah pemerintah daerah (*local government*) melainkan *private sector* sehingga hal ini terlihat unik karena kerja sama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bukanlah klub Persebaya asal Surabaya. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti analisis dimensi dan peran aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Liverpool.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2019) yaitu: 1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci; 2) peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif; 3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*; 4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Dalam pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball* agar selain menysasar kepada informan tertentu, penelitian ini diharapkan mengalir untuk terus mendapatkan validasi yang peneliti lakukan melalui triangulasi (Anggito and Johan Setiawan, 2018).

Fokus penelitian ini ingin menganalisis dimensi dan peran aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam

mengembangkan persepakbolaan di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan selama periode bulan September hingga Desember 2019 dengan narasumber:

1. Kepala Sub Bagian Informasi Humas Pemerintah Kota Surabaya;
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
3. Sub Bidang Kerja sama Internasional, Bagian Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya;
4. Raditya Duta Mahendra, Pemain sepak bola muda Kota Surabaya yang dikirim ke Liverpool;
5. Aprillo Ferdinan Retassambery, Pemain sepak bola muda Kota Surabaya yang dikirim ke Liverpool;

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *interactive model* dari Miles et al (2014) yaitu *data collection, data condensation, data display, hingga conclusion: drawing* atau *verification*.

Hasil

Terdapat empat aktor *sound governance* dalam kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Liverpool sebagai berikut:

1. **Government (Pemerintah)**

Peran bagian kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan kerja sama Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam pengiriman 10 (sepuluh) pemain sepak bola muda berbakat dalam kerangka kerja sama *sister city* adalah dimulai dari proses pengiriman surat penawaran kerja sama dari Kota Liverpool hingga penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Selain itu peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan Kementerian Luar Negeri sangat penting untuk menyetujui adanya kerja sama tersebut. Kedatangan delegasi dari Kota Liverpool ke Kota Surabaya untuk melakukan kerja sama menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool pada tanggal 19 Maret 2018, dengan bidang kerja sama meliputi pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar (*smart city*), dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Surabaya untuk mengatur segala aspek perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi program. Selain itu, Dispora Kota Surabaya merupakan pelaksana teknis dalam hal pengiriman 10 (sepuluh) pemain sepak bola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool yang bertempat di *Tranmerre Rovers Football Club*, yaitu dengan melakukan seleksi dan memilih sebanyak 9 (Sembilan) pemain sepak bola berbakat. Serta 1 (satu) pemain lagi yaitu Mohammad Supriadi yang mendapatkan *golden ticket* dari Pemerintah Kota Surabaya karena memiliki potensi yang sudah tidak diragukan lagi.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Surabaya juga turut andil dalam pengiriman 10 pemain sepak bola muda berbakat yaitu dengan diselenggarakannya *press release* sebelum pemain diberangkatkan ke Kota Liverpool dan sesudah kepulangan pemain dari kota tersebut ke Indonesia. Kemudian penulisan berita melalui media sosial seperti berita, *web page*, facebook dan instagram Humas Pemerintah Kota Surabaya yakni akun Bangsa Surabaya.

2. **Private Sector (Swasta)**

Campur tangan pihak swasta hampir tidak ada di dalamnya, dikarenakan hal ini merupakan program pemerintah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut tidak diperbolehkan adanya sponsor yang berkaitan dengan *sponsorship* di dalam proses kegiatannya. Peran swasta memang tidak banyak dan tidak berkaitan dengan persoalan finansial. Namun, peran swasta dalam hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan salah satu klub sepak bola yang ada di Kota Surabaya yaitu Persebaya FC. Persebaya FC turut berpartisipasi sebagai tim seleksi yang membantu pihak Dispora Kota Surabaya.

Persebaya Surabaya merupakan klub profesional sepak bola yang berjalan secara *independent* atau mandiri dalam pengelolaan anggaran dan dapat dikatakan sebagai *business oriented*, bahkan mampu menyumbangkan bagi APBD Kota Surabaya. Seleksi dilakukan oleh pihak Dispora melalui beberapa tahap, yang pertama adanya seleksi melalui pertandingan antar klub-klub liga yang ada di Kota Surabaya. Pada awalnya tahapan ini diketahui para klub melalui undangan yang dikirimkan oleh pemkot Surabaya yakni Dispora pada tiap-tiap klub. Setelah seleksi melalui klub, tahap selanjutnya dilakukan seleksi per individu, hingga seleksi ketiga memperoleh 30 peserta yang tersisa, dan di tahap seleksi akhir diperoleh 9 pemain sepak bola muda berbakat dan 1 pemain yang tanpa mengikuti tes yaitu Muhammad Supriyadi serta 2 orang sebagai *official*, satu orang *official* berasal dari salah satu klub sepak bola di Kota Surabaya dan satu orang *official* berasal dari perwakilan Dispora Kota Surabaya.

3. *Civil Society* (Masyarakat)

Peran aktor masyarakat, subjek atau sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool yaitu 10 pemain U-15 yang diperoleh dari proses seleksi pemain secara ketat dari 850 pelajar. Pemain-pemain selaku informan dalam penelitian ini mengetahui adanya kerja sama ini dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi internal. Berdasarkan sub aspek fokus penelitian yang telah ditentukan didapatkan temuan yaitu:

Temuan pertama, didapatkan temuan bahwa dalam proses seleksi pemain, seleksi yang dilakukan yaitu dengan membuat suatu kegiatan pertandingan antar klub atau kompetisi internal se-Surabaya, kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pelaksana teknis. Adapun pemain yang akan dikirim ke Liverpool melalui seleksi yang cukup panjang, mulai dari tes fisik hingga tes psikotes. Adapun tim yang menyeleksi yakni pihak Dispora Kota Surabaya.

Temuan kedua, dalam aspek anggaran untuk akomodasi para pemain yang dikirim ke Liverpool telah diatur oleh kedua belah pihak yakni Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Liverpool dan tidak mendapat bantuan dana dari pihak swasta. Selama di Kota Liverpool para pemain ditemani seorang pelatih Legenda Persebaya yaitu Yusuf Ekodono dan Edy dari Dispora Kota Surabaya serta satu orang penerjemah bahasa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang berlokasi di Kota Liverpool. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya secara serius dalam pembinaan usia muda. Adanya pendampingan tersebut juga memberikan dukungan secara moral terhadap pemain itu sendiri. Selain itu, selama di Kota Liverpool para pemain diterima dengan baik serta mendapat fasilitas secara kompleks seperti kegiatan pelatihan, kegiatan menonton pertandingan antar klub di Inggris, jalan-jalan mengelilingi tempat-tempat bersejarah di Inggris, dan lain-lain.

Temuan ketiga, didapatkan temuan bahwa dari adanya kerja sama internasional ini, bibit-bibit pemain unggul yang telah dikirim mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dapat dikatakan bahwa ketika pemain diberikan fasilitas, sarana prasarana yang memadai dan berkualitas tinggi, hal tersebut juga berdampak pada pemain itu sendiri seperti mental bertanding yang lebih berani, optimis dalam pengambilan keputusan, dan pola strategi permainan sepak bola khas Eropa yang tidak didapatkan di Indonesia. Selain

itu, pemain mengetahui nutrisi-nutrisi makanan yang baik untuk dikonsumsi, karena dari aspek biologis membuktikan bahwa nutrisi atau pola makan seorang pemain sepak bola profesional memiliki dampak yang cukup signifikan ketika bermain di lapangan.

Dari ketiga temuan di atas menunjukkan bahwa peran masyarakat (pesepakbola muda berbakat) lebih condong sebagai objek dari adanya kerja sama internasional tersebut. *Output* untuk pemain itu sendiri adalah memiliki pengalaman yang berdampak pada kemampuan diri dari aspek psikologis maupun biologis dan di masa yang akan datang diharapkan dapat mengharumkan cabang olahraga sepak bola di Kota Surabaya maupun Indonesia.

4. International

Pada sektor internasional analisis dari konsep *Sound Governance* yang digagas oleh Ali Farazmand (2004) terlihat bahwasanya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak internasional yaitu Pemerintah Kota Liverpool. Ditemukan hasil penelitian bahwasanya proses alur kerja sama dari kedua pemerintah kota ini melalui hubungan diplomasi yang baik antara negara Indonesia dengan negara Inggris. Sebuah kerja sama internasional tidak akan berjalan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah pusat, kemudian dari kedutaan besar Indonesia yang berlokasi di negara Inggris juga sangat mendukung adanya kerja sama *sister city* antar dua kota ini. Peran internasional dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Liverpool, mereka memberikan bantuan berupa fasilitas mengenai informasi dan tempat tinggal bagi pemain-pemain yang dikirim. Adapun Pemerintah Kota Liverpool turut mengajak pemain-pemain tersebut untuk *city tour* di Inggris.

Kerja sama yang dilakukan oleh Liverpool dan Surabaya tidak hanya memainkan peran kerja sama antar kota, namun juga antar negara dan lintas benua. Hal ini bermula dari pertemuan Wali Kota Surabaya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua kerja sama antar kota ini mulai terlihat setelah Pemerintah Kota Liverpool yang ada di Inggris mengirimkan surat permohonan kerja sama dengan Kota Surabaya, dengan proses yang cukup lama dari tahun 2017 hingga 2018, MoU berhasil dibentuk dan ditandatangani oleh kedua kota tersebut. Pemerintah tingkat kota tidak dapat melakukan kerja sama internasional apabila pemerintah pusat tidak mengizinkan, karena kerja sama *sister city* dengan internasional ini bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah kota, pemerintah pusat juga turut andil, sehingga meskipun segala proses telah dilakukan pada level lokal (daerah), tanggung jawab penuh tetap berada di pemerintah pusat.

Diskusi

Kata dimensi disini penting untuk menyebut istilah 'indikator'. Sebab sebagaimana dalam *good governance* dan konsep hegemonik lainnya, indikator keberhasilan adalah sebuah prasyarat mutlak bagi sebuah gagasan agar dapat dikatakan implementatif. Sebuah gagasan yang implementatif harus dapat diukur capaian/keberhasilan kinerjanya. Dalam perspektif *sound governance* terdapat sepuluh dimensi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik. Dimensi-dimensi tersebut adalah:

1. Proses

Kerja sama antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool dalam kerangka *sister city* ini memiliki proses yang cukup panjang, berikut ini tahapan-tahapannya:

1. Surat pengajuan atau penawaran kerja sama *sister city* dari pihak Kota Liverpool kepada Kota Surabaya.
2. Kota Surabaya melalui bagian kerja sama menerima surat ajuan kerja sama *sister city*.
3. Wali Kota Surabaya sebagai pemegang otoritas politik tertinggi di Kota Surabaya berhak menyatakan menindaklanjuti atau menolak tawaran kerja sama dibantu oleh beberapa staf dari Sekretaris Daerah, Asisten dan Bagian Kerja sama untuk ditelaah

4. Apapun sikap Wali Kota Surabaya baik itu menyetujui maupun menolak tetap perlu mendisposisikannya kepada bagian kerja sama untuk dibuatkan surat tanggapan persetujuan atau penolakan dan permohonan fasilitasi penyusunan LoI (*Letter of Intent*) apabila setuju.
 5. Pengajuan Draft LoI
 6. Melakukan koordinasi dengan mitra Luar Negeri dalam hal ini adalah Liverpool untuk penyusunan draft LoI
 7. Penandatanganan LoI
 8. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kepada DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran.
 9. Pembuatan surat permohonan fasilitasi rapat internal dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk penyusunan draft LoI (dengan dilampiri draft LoI)
 10. Rapat internal dengan Kementerian
 11. Penyusunan draft MoU
 12. Penandatanganan MoU
2. Struktur
- Struktur menunjukkan arah dan memandu jalannya sebuah proses. Arah dan jalan itu adalah sebuah tatanan, tatanan dalam perspektif *sound governance* merupakan keseluruhan sistem tata pemerintahan yang terbagi di masing-masing elemen. Ada beberapa struktur dalam kerja sama *Sister City* ini, diantaranya yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah lembaga yang menaungi Pemkot Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan. Kemudian yang memprakarsai terjalannya *sister city* adalah Pemerintah Kota Surabaya melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kota Surabaya memiliki bagian Administrasi Kerja sama yang mengurus kegiatan secara administrasi seperti pengurusan *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam proses pengesahan kerja sama *Sister City*. Kemudian Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting dalam hal publikasi dan penyelenggaraan *press release* baik sebelum keberangkatan maupun pelaksanaan kegiatan hingga kepulangan. Media publikasi yang digunakan diantaranya adalah web Pemerintah Kota Surabaya yang disebut, *facebook* Bangga Surabaya, dan *instagram* dan lain-lain yang biasa disebut Bangga Surabaya. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga berperan sebagai pelaksana teknis yaitu sebagai penyelenggara bagi seleksi pemain sepak bola muda berbakat.
3. Kesadaran dan Nilai
- Menurut (Gidden, 1995) Nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang, kelompok maupun organisasi mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah memenuhi prasyarat tersebut. Adanya kesadaran, kesamaan nilai dan karakteristik antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool mengakibatkan kerja sama ini terbentuk. Beberapa kesamaan yang dimiliki oleh kedua kota adalah pelabuhan yang berperan penting dalam perdagangan dan arus logistik sehingga kerja sama yang disepakati yaitu dalam bidang perekonomian, kemudian kedua kota juga memiliki kesamaan suporter yang fanatik terhadap sepak bola sehingga keterikatan itu menjadi dasar kerja sama di bidang olahraga salah satunya melalui pengiriman pemain sepak bola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool. Dengan adanya karakteristik yang sama menyebabkan kedua kota ini bekerja sama untuk berkomitmen membawa kemajuan bagi kedua kota.
4. Konstitusi
- Konstitusi adalah dokumen penting yang mendasari adanya sebuah kebijakan, konstitusi dalam kerangka kerja sama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota

Liverpool yakni dokumen legal dan formal yang tertuang secara jelas pada *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) setelah melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan pada dimensi proses. Namun hal yang perlu diperhatikan sebelum penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sesuatu yang mendasari yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan. Peraturan tersebut adalah landasan kebijakan *sister city*.

5. Organisasi dan Institusi

Organisasi dan Institusi yang terlibat dalam kerja sama pengiriman sepak bola muda berbakat ke Liverpool ini yaitu Bagian Administrasi Kerja sama, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya dan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Kedutaan Besar Inggris di Surabaya. Kolaborasi antar Dinas dan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan organisasi ataupun institusi dalam hal ini Pemkot Surabaya untuk mengembangkan bidang persepakbolaan Kota Surabaya kearah yang lebih baik lagi. Komitmen organisasi ditunjukkan oleh Dispora Kota Surabaya melalui keterlibatannya dalam proses seleksi sepuluh pesepakbola muda yang telah memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, Bagian Humas Pemkot Surabaya juga menunjukkan komitmennya dalam hal komunikasi kepada publik melalui media massa. Tujuannya supaya publik mengetahui bahwa Pemkot Surabaya memberikan perhatian lebih terhadap persepakbolaan di kotanya. Bagian Administrasi Kerja Sama juga memiliki peranan penting untuk membantu dalam pengurusan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan LoI (*Letter of Intent*). Program ini juga tidak akan berjalan jika tanpa adanya kontribusi dari Kedutaan Besar Inggris di Surabaya yang menjadi penghubung antara Surabaya dan Liverpool dalam proses pembentukan kerja sama.

6. Manajemen dan Performa

Manajemen dalam kebijakan pengiriman sepuluh pesepakbola muda berbakat ini terjalin sangat baik antar instansi terkait. Terbukti dengan adanya perencanaan dan persiapan yang cukup matang yaitu enam bulan sebelum proses seleksi dan pemberangkatan sepuluh pesepakbola muda tersebut. Hal lain tercermin dari performa tiap instansi dalam melaksanakan tugasnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Surabaya atas kerja sama *sister city* dengan Kota Liverpool, setiap instansi yang terlibat langsung menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik. Namun dalam pengurusan administrasi oleh Bagian Administrasi Kerja sama terjadi sedikit kendala yaitu proses perizinan yang panjang dan lama. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi kendala yang berarti.

7. Kebijakan

Kerja sama pemerintah daerah dengan daerah yang berada di negara lain telah diatur secara sah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan. Berlakunya Permendagri tersebut menjadi payung hukum bagi Pemkot Surabaya untuk dapat menjalin kerja sama dengan daerah di berbagai belahan dunia. Pemberangkatan sepuluh pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool ini dilandasi adanya kerja sama antar daerah bersama negara lain yang disebut sebagai 'kota kembar' atau *sister city*. Pemkot Surabaya telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa kota di berbagai negara di dunia seperti Korea, Jepang, dan Inggris. Di Kota Liverpool sendiri telah menyepakati beberapa kerja sama di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang olahraga khususnya cabang olahraga sepak bola.

8. Sektor

Dimensi sektor menekankan akan pentingnya keahlian guna mendorong kemajuan. Pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya yang diberangkatkan ke Kota Liverpool diharapkan mampu mengembangkan keahlian dan kemampuannya di bidang sepak bola. Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan partisipasi langsung warga dalam meningkatkan performa dan kinerja organisasi publik. Dapat kita ketahui secara visual bahwa perkembangan sepak bola di Liverpool maju secara pesat. Negara Inggris, khususnya kota Liverpool telah mengukir sejarah persepakbolaan yang mendunia.

9. Faktor Internasional

Dalam tahapan formulasi kebijakan, Internasional dalam hal ini Kota Liverpool berperan menawarkan kerja sama kepada Pemkot Surabaya hingga pada tahapan persetujuan dari Wali Kota Surabaya. Pemerintah Kota Liverpool juga merumuskan beberapa agenda kegiatan yang akan dilakukan selama para pesepakbola muda berbakat dari Kota Surabaya berada di Kota Surabaya. Dalam tahapan implementasi, Kota Liverpool melalui Tranmere Rovers FC memiliki tugas untuk melatih para pesepakbola muda berbakat hingga mereka benar-benar terlatih, memperoleh *skill* dan mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya di Indonesia. Dalam tahapan evaluasi, Tranmere Rovers FC tidak lupa selalu memberikan laporan perkembangan per pemain sepakbola kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam setiap permainan yang telah dilakukan oleh pemain.

10. Etika

Kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Surabaya dan Kota Liverpool idealnya merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan perlu adanya hubungan timbal balik. Surabaya di sini diuntungkan dengan diberangkatkannya pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool terlepas apa yang didapatkan oleh Kota Liverpool dari Kota Surabaya. Sepulang dari Kota Liverpool, mereka tentunya mendapatkan banyak ilmu baru yang diharapkan diimplementasikan dalam bermain bola. Harus disadari pula bahwa ada misi-misi ekonomi maupun politik dibalik kerja sama yang telah disepakati. Tetapi sebagaimana pandangan konstruktivisme bahwa segala sesuatu tidak ada yang baku. Yang dibutuhkan adalah kecerdikan kita dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ketika Bagian Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya mendisposisikan surat kepada Wali Kota Surabaya, beliau mampu menangkap peluang dengan baik momentum penawaran kerja sama ini ditunjukkan dengan tanggapan yang penuh antusias dan semangat penuh secerca harapan.

Kesimpulan

Dari sepuluh dimensi *sound governance* yang ada, Kota Surabaya dan Kota Liverpool mampu membuktikan keseriusannya sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah diterjemahkan ke dalam *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU). Sehingga secara keseluruhan, dimensi *sound governance* benar-benar dijalankan sesuai dengan porsi dan mengupayakan semaksimal mungkin segala sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan keberhasilan program yang telah disepakati oleh kedua kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori *sound governance* diimplementasikan dengan baik dalam program pengiriman pesepakbola muda berbakat Kota Surabaya ke Kota Liverpool.

Selain itu, keempat aktor *sound governance* yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan internasional telah menunjukkan kerja sama dan peran aktif mereka meskipun ada beberapa aspek yang belum bisa dioptimalkan secara penuh. Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Humas Pemkot, Dispora, maupun bagian Kerja Sama telah memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kebutuhan program, yang agak disayangkan adalah peran swasta lokal, karena dukungan dana dalam bentuk sponsor tidak ada. Namun semuanya

berjalan dengan lancar berkat bantuan dari Persebaya FC dalam bentuk bantuan untuk menyeleksi calon anak muda yang diberangkatkan dan pihak Liverpool yakni Tranmere Rovers FC berupa pelatihan hingga jaminan penuh selama di Liverpool. Berkat klub sepak bola tersebut, keterlibatan swasta terasa hidup. Peran *civil society* juga terlihat pada antusiasme masyarakat melalui seleksi para bakal calon pemain muda yang dikirim ke Kota Liverpool yang diikuti hingga 850 pemuda. Sedangkan peran internasional adalah inisiator kerja sama ini, hingga menjamin kebutuhan para pesepakbola muda berbakat selama berlatih di sana.

Adapun saran untuk Pemerintah Kota Surabaya ke depannya adalah sebagai berikut: 1) Dalam kerja sama pengiriman pesepakbola muda berbakat diharapkan dapat berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi peran aktor *government, civil society, international* dan *private sector* dan memegang teguh dimensi *sound governance* sehingga dalam pengembangan pembinaan sepak bola bagi usia muda dapat berjalan dengan optimal dan progresif; 2) Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan kerja sama, tidak hanya dengan Kota Liverpool semata, namun dengan berbagai kota di dunia dalam pengiriman pesepakbola muda berbakat agar semakin banyak anak-anak muda Kota Surabaya yang berpotensi menjadi pemain pesepakbola profesional yang berkualitas dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3) Sepulang dari Kota Liverpool, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan lanjutan guna memonitoring perkembangan kapasitas keahlian mereka dalam bermain sepak bola. Tentu dengan tujuan bahwa pengiriman yang dilakukan tepat sasaran, dengan melihat hasil dan dampak dari adanya pengiriman pesepakbola muda berbakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bagian Administrasi Kerja sama Pemerintah Kota Surabaya. (2018). *Surabaya dan Liverpool Tanda Tangani Kerja sama Sister City*.
- Bagian Kerja sama Kota Bandung. (2022). *Sister City Kota Bandung*. Kerja sama.Bandung.Go.Id. <http://kerja.sama.bandung.go.id/category/sub-bagian/luar-negeri/sister-city>
- Damayanti, N. (2018). Strategi Pengembangan Kerja sama Sister City Kota Semarang, Indonesia – Brisbane, Australia. *EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27220>
- Efendi, Z. (2017). *Surabaya dan Liverpool Resmi Jadi Sister City*. Detiknews.
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance, Policy and Administrative Innovations*. Praeger Publisher.
- Firdaus, F. (2016). Sound Governance in the Development of Mamminasata Metropolitan Areas in South Sulawesi Province. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.9915>
- Firmansyah, T. (2017). *Anies: Jakarta dan Seoul Sudah Menjadi Sister City*. Republika.Co.
- Giddens, A. (1995). *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Muhamad Rizky. (2019). *Sister City Jakarta-Berlin 25 Tahun, Anies: Semoga Ada Ide Bantu Disabilitas*. Okenews.
- Nuralam, I. P. (2018). Peran Strategis Penerapan Konsep Sister City Dalam Menciptakan Surabaya Green-City. *Journal of Applied Business Administration*, 2(1), 144–151. <https://doi.org/10.30871/jaba.v2i1.807>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
- Pratiwi, D. (2019). *Persija Jalin Kerja sama dengan Klub Asal Argentina* Artikel ini telah tayang di *Wartakotalive* dengan judul *Persija Jalin Kerja sama dengan Klub Asal Argentina*, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/26/persija-jalin-kerja-sama-dengan-klub-asal-argentina>. Wartakotalive.Com.
- Ruslan Burhani. (2018). *“Sister City” Jakarta-Hanoi berbagi pengalaman kelola perkotaan*. Antaranews.Com.
- Sangkala. (2011). Praktik Good Governance dan Implikasinya terhadap Konsep dan Idiologi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Administrasi Di Negara –Negara Berkembang (Sound Governance Sebagai Antitesis Dari Good Governance). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Tjahjanulin, D. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.